



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM  
**SUB UNIT KERJA** : BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **DADANG SOMANTRI**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **185816**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.915.863.423**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/36 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 235.944.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/73 m2 di SEMARANG, WARISAN Rp. 553.528.000
3. Bangunan Seluas 28 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 383.254.423
4. Tanah Seluas 1659 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 403.137.000
5. Tanah Seluas 128 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. Tanah Seluas 128 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
7. Bangunan Seluas 21.18 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 423.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, WARISAN Rp. 7.500.000
2. MOBIL, HONDA BRIO E SATYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA MINI BUS Tahun 2018, WARISAN Rp.



290.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 67.625.500

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 1.285.600.426

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 3.692.589.349

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 3.692.589.349

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.